

3. URUSAN PANGAN

Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1) Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2) Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3) Penanganan kerawanan pangan dan 4) Keamanan pangan.

Secara makro ketahanan pangan di Jawa Tengah dalam kondisi mantap. Berdasarkan data ketersediaan pangan Provinsi Jawa Tengah, ketersediaan beras sebesar 5,651,792 ton surplus 2,437,246 ton, ketersediaan jagung 3,244,161 ton surplus 3,202,772 Ton. Sedangkan ketersediaan kedelai 157,320 ton dan defisit sebesar 166,894 Ton.

Dari aspek distribusi, berdasarkan hasil pemantauan harga tahun 2019 menunjukkan bahwa harga kebutuhan masyarakat relatif stabil. Nilai koefisien variasi (CV) harga beras sebesar 1,17% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 4,38% atau turun sebesar 73,29%. Stabilisasi harga dapat dilihat dari nilai koefisien (CV), semakin rendah nilai CV semakin stabil. Meskipun terjadi volatilitas harga pangan pada beberapa komoditas seperti: bawang merah, cabai merah keriting dan cabai rawit merah, namun koefisien variasi harga komoditas tersebut masih sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari aspek konsumsi, kondisi ketahanan pangan cukup baik diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan sebesar 89,61 naik 2,31 point dari tahun sebelumnya. Sedangkan PPH untuk konsumsi umbi-umbian dan pangan hewani masih perlu ditingkatkan menuju PPH ideal (100). Sementara peningkatan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan dilaksanakan melalui sertifikasi dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui indikator kinerja program Peningkatan Ketahanan Pangan yang terdistribusi kedalam 14 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 14 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pangan L-I.A.2.3.1-2

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pangan L-I.A.2.3.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut : Peningkatan Ketahanan Pangan memiliki 14 indikator dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi (100%). Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	14	14	-	-	-	-
	Jumlah	14	14	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, memiliki 14 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi antara lain : CV harga pangan strategis bawang merah dengan realisasi 23,85% memiliki capaian 121,59%; CV harga pangan strategis beras dengan realisasi 1,17% memiliki capaian 427,35%; CV harga pangan strategis cabai dengan realisasi 25,1% memiliki capaian 175,3%; Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas dengan realisasi 4023 (kkal/kapita/hari) memiliki capaian 100,58%; Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas dengan realisasi 107,77 (Gram/kapita/hari) memiliki capaian 100,72%; Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur dengan realisasi 96,2(kg/kapita/tahun) memiliki capaian 115,9%; Konsumsi kelompok pangan hewani dengan realisasi 34,3 (kg/kapita/tahun) memiliki capaian 114,33%; Konsumsi pangan beras dengan realisasi 95,9 (kg/kapita/tahun) memiliki capaian 103,34%; Persentase cadangan pangan yang dikelola dengan realisasi 100% memiliki capaian 100%; Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan dengan realisasi 95,43% memiliki capaian 119,29%; Persentase penanganan daerah rawan pangan dengan realisasi 95,24% memiliki capaian 112,05%; Persentase pengawasan keamanan pangan segar dengan realisasi 98,17% memiliki capaian 109,08%; Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan dengan realisasi 0,46 memiliki capaian 104,55%; Rasio konsumsi pangan lokal dengan realisasi 0,16 memiliki capaian 145,45%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota antara lain skor Pola Pangan Harapan tertinggi di Kab Sragen (97,40) terendah di Kab Temanggung (77,90). Luas KP2B tertinggi di Kabupaten Grobogan (71.949 ha) dan terendah di Kota Magelang (65 ha).

Penyelenggaraan Program Peningkatan Ketahanan Pangan mempunyai manfaat yaitu terciptanya stabilitas harga dan pasokan pangan khususnya beras, penurunan biaya transaksi dan pemotongan rantai pasok dalam proses distribusi beras dan peningkatan daya saing PSAT.

Adapun realisasi sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana Lampiran: L-I.E.7.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp38.519.506.000,00 yang terdistribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp19.449.506.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp19.070.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 1 program dengan realisasi fisik sebesar 99,80% dan keuangan 97,46%.

1) Belanja Langsung

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, alokasi anggaran sejumlah Rp19.070.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,80% dan keuangan 97,46%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat dengan keluaran dilaksanakannya pemberdayaan di 34 desa sebagai upaya penanganan kerawanan pangan; Kegiatan Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA dengan keluaran terfasilitasinya 125 kelompok pemanfaatan pekarangan dan 13 sekolah yang diedukasi tentang penganeekaragaman konsumsi pangan B2SA; Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan dengan keluaran diterbitkannya 183 nomor pendaftaran PSAT, 2 sertifikat rumah kemas, 5 sertifikat Prima 3, 1 sertifikat Prima 2, 10 sertifikat kesehatan untuk mendukung ekspor pala dan 8 sertifikat organik.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.3.1-2.

2) Belanja Hibah dan Bansos

Belanja Hibah bidang Pangan sebesar Rp1.725.050.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,95%, dialokasikan untuk 124 poktan/gapoktan/ KWT. Hibah tersebut digunakan untuk pengembangan bahan pangan lokal, fasilitasi pendukung keamanan pangan, Fasilitasi RMU, alat Ukur Kadar Air di lumbung pangan masyarakat, Fasilitasi Gabah LDPM dan Stimulan Pengembangan Pangan Lokal. Belanja bantuan sosial sebesar Rp2.715.240.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,49%, dialokasikan untuk 68 kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Pangan pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 1 hal, yaitu perlu adanya program intensifikasi pangan secara sistematis dalam rangka mencegah ketiadaan dan fluktuasi harga pangan. Hal ini ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran untuk perancangan dan pembangunan aplikasi SISLOGDA, penyiapan SDM dan penyedia jasa, uji coba terbatas aplikasi SISLOGDA pada 6 Gapoktan, BUMP, Asosiasi dan Korporasi, serta penyiapan aspek legal (regulasi).

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Data stok pangan belum terpantau secara baik dan terlalu panjangnya rantai distribusi pangan, yang mengakibatkan disparitas harga antara produsen ke konsumen cukup tinggi;
- 2) Konsumsi beras dan terigu masih relatif tinggi;
- 3) Kurangnya pengetahuan kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dalam menerapkan jaminan mutu keamanan pangan khususnya higiene sanitasi dalam proses produksi PSAT masih kurang.

Solusi

- 1) Membangun Sistem Logistik Pangan Daerah (SISLOGDA) guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2) Diversifikasi pangan non beras dan non terigu serta pengembangan pangan lokal melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
- 3) Pendampingan dan pembinaan kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dalam menerapkan jaminan mutu keamanan pangan.